

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM MAKASSAR RECOVERY
DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KOTA MAKASSAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



**Disusun dan Diajukan oleh:
MUH DWIN PUTRA ABADI PURNAMA ISMAIL
E041181320**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM MAKASSAR RECOVERY
DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin*



DISUSUN OLEH:

MUH DWIN PUTRA ABADI PURNAMA ISMAIL

E041181320

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM MAKASSAR RECOVERY
DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan Diajukan Oleh :

MUH DWIN PUTRA ABADI PURNAMA ISMAIL

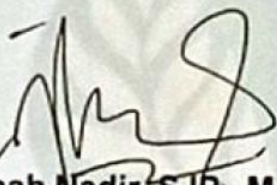
E041181320

Telah diperiksa dan diujikan
Pada Tanggal 24 Februari 2023

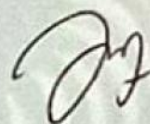
Menyetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.
NIP. 197912182008122002



Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.
NIP. 199205022019044001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 196212311990031023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM MAKASSAR RECOVERY
DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan Diajukan Oleh

MUH DWIN PUTRA ABADI PURNAMA ISMAIL

E041181320

Telah diterima dan disetujui oleh Panitia Ujian Sarjana Ilmu Politik
pada Program Studi ilmu politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.

(.....)

Sekretaris : Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.

(.....)

Anggota : Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si.

(.....)

Anggota : Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si.

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muh Dwin Putra Abadi Purnama Ismail

NIM : E041181320

Program Studi : Ilmu Politik

Jenjang Pendidikan : S1

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM MAKASSAR RECOVERY DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KOTA MAKASSA"** adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan karya orang lain. Tidak ada bagian yang memuat duplikasi dari karya orang lain yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.

Atas pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan sebagian skripsi ini merupakan karya orang lain yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.

Makassar, 24 Februari 2023



Muh Dwin Putra Abadi Purnama Ismail

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas segala berkah rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM MAKASSAR RECOVERY DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KOTA MAKASSAR”**. Shalawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mulia, yang menjadi suri tauladan penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dibuat dan diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat sebagai mahasiswa sarjana (S1), untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S. IP) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Segala bentuk masukan, kritik dan saran yang membangun masih sangat dibutuhkan. Selama pembuatan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kendala dan tantangan, namun berkat segala bantuan dan doa dari semua pihak yang telah menemani perjalanan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, izinkan penulis dalam pendahuluan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat tanpa terkecuali.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang terhebat yang dikirimkan Tuhan kepada penulis, yaitu kedua orang tua tercinta, Bapak **ISMAIL SYAM,SH** dan Ibu **SUKMAWATI**, yang menyayangi juga selalu berkorban dan menjadi penyemangat bagi penulis. Bapak dan ibuku tercinta dan tersayang, doa kalian yang tiada hentinya selalu terpanjatkan untuk penulis terus berkarya dan melangkah dalam menuntut ilmu sejauh ini. Kepada saudara/i penulis, **ZIDAN ISMAIL , RADITIYA ANANTA ISMAIL** yang selalu mendoakan dan membantu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu **Dr.Sakinah nadir,S.IP. M.Si.** selaku penasehat akademik (PA) sekaligus dosen pembimbing 1 dan ibu **Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.** selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini. Kepada Seluruh Informan yang telah memberikan data dan informasi yang akurat sesuai dengan yang peneliti butuhkan.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc**, selaku Rektor baru Universitas Hasanuddin beserta jajarannya selamat atas masa

baktinya, semoga kedepannya memberikan banyak kemajuan dalam sistem pendidikan Universitas Hasanuddin.

2. Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si** selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberikan ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Ibu **Dr. Hasniati S.Sos.**, Bapak **Dr. Moehammad Iqbal Sultan, M.Si.**, Serta Bapak **Prof. Dr. Suparman, M.Si.** selaku Wakil Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan urusan akademik serta kemahasiswaan.
4. Bapak **Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D**, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi di Departemen Ilmu Politik.
5. Seluruh dosen- dosen Program Studi Ilmu Politik : Bapak **Prof. Dr. Muhammad, M.Si**, Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si**, Bapak **Drs. H. Andi Yakub, M.Si**, Bapak **Dr. Muhammad Saad, MA**, Bapak **Andi Naharuddin, S.IP, M.Si**, Bapak **Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si**, Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si**, Ibu **Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si**, Ibu **Dr. Ariana Yunus M.Si**, Bapak **Dr. Imran, S.IP, M.Si**, Ibu **Sakinah Nadir, S.IP, M.Si**, Ibu **Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si**, Bapak **Zulhajar, S.IP, M.Si**, dan Ibu **Dian Ekawati, S.IP, M.Si** yang telah memberikan banyak ilmu, saran, serta arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

6. Seluruh **Staf Akademik Departemen Ilmu Politik** yang telah memberikan bantuan jasa dalam bidang keadministrasian kepada penulis selama menjadi seorang mahasiswa.
7. Kepada keluarga besar **Himapol FISIP Unhas** yang telah menjadi wadah pembelajaran di luar kelas perkuliahan, dan telah berkontribusi besar dalam pengembangan diri penulis selama berkuliah. Himapolku, Himapolmu, Himapol Kita Semua.
8. Kepada teman-teman sahabat **Ilmu Politik 2018** yang telah kebersamai penulis sedari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.
9. Kepada saudara saudaraku **Revolusi18** Terima kasih telah menjadi saudara yang sangat baik yang selalu membantu dan mendukung dalam perjalanan belajar bersama di Ilmu Politik Fisip Unhas.
10. Kepada Sepupu saya **AKBAR, UKI, FATUR** Yang selalu memberikan materi maupun non materi dan selalu kebersamai penulis dalam menunggu harapan.
11. Kepada sobat KCL **ZAKY , RAKHA, IRFAN, GIBRAN,** dan **DANDY** yang selalu kebersamai penulis dalam kondisi suka maupun duka.
12. Kepada Teman teman kosyong **JAMIL, KAISAR DAN VIA** . Yang telah mengajarkan penulis banyak hal positif serta selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan tulisannya.

13. Kepada sahabat **KKN UNHAS 107 DESA PALALAKKANG** khususnya **ALIFIA, KINA, NURHAM, NURLIA, MAULIDIA DAN NURMUSLIMAH** yang telah kebersamai penulis dalam mengikuti program pengabdian masyarakat selama mengikuti perkuliahan.
14. Kepada sahabat **KPA KALPATARU SMANSA MAKASSAR** terima kasih telah menjadi saudara terbaik sekampung halaman dan menjadi rumah untuk pulang.
15. Kepada setiap **Informan** yang telah meluangkan waktunya dan bersedia membantu penulis dengan ikhlas dalam mengumpulkan informasi yang dijadikan bahan dalam tulisan ini.

Selebihnya terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh teman-teman yang terlupa dan tak bisa penulis tuliskan satu-persatu, sesungguhnya kalian tetap teringat sebagai catatan akhir kuliah di kehidupan kemahasiswaan penulis. Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Sekian dan terima kasih

Makassar, 24 Februari 2023

MUH DWIN PUTRA ABADI PURNAMA ISMAIL

ABSTRAK

Muh Dwin Putra Abadi Purnama Ismail, NIM E041181320, Departemen Ilmu Politik, dengan judul Skripsi “Implementasi Kebijakan Program Makassar Recovery Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Makassar”. Dibawah Bimbingan Sakinah Nadir Selaku Pembimbing Utama dan Ummi Suci Fathia Bailusy Selaku Pembimbing Pendamping

Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan sebuah kebijakan Perwali Nomor 5 tahun 2021 tentang Makassar *Recover* dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 di Kota Makassar. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Implementasi kebijakan program Makassar Recovery dalam penanganan Covid-19 di Kota Makassar

Dasar penelitian dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan Tipe penelitian Deskriptif Analisis, dimana tipe penelitian ini merupakan suatu cara dalam dalam memecahkan suatu masalah dengan berdasarkan fakta dan data-data yang ada. Landasan teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi dari Merille s. grindle untuk melihat peran dan pelaksanaan pemerintah terkait kebijakan Penanganan Covid-19 di Kota Makassar. Hal tersebut dilakukan dengan melihat bahwa peneliti telah mendapatkan informasi yang dilakukan secara langsung dengan mewawancarai pihak terkait.

Berdasarkan Hasil dari penelitian ini terdapat 3 faktor yang berpengaruh dalam Implementasi Kebijakan yaitu Strategi dari aktor yang terlibat, Karakteristik Lembaga dan tingkat kepatuhan. Dalam pelaksanaan kebijakan Program Makassar recovery menemukan bahwa keberhasilan kebijakan program Makassar recovery tidak terlepas dari Dinas Kesehatan dan dinas terkait yang turut andil dalam melakukan penanganan Covid-19 ini dan seluruh elemen yang terlibat mampu menjalankan tugas nya dengan baik sehingga 3 ecosystem Makassar recovery yaitu imunitas Kesehatan ,adaptasi sosial, dan pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik Sehingga masyarakat yang terdampak Penyebaran Virus Covid-19 dapat beradaptasi dengan baik dan Keefektifan Program Makassar recovery dalam menanggulangi bencana Covid-19 meraih penghargaan pada ajang Indonesia Awards 2021 yang di adakan MNC Inews.

Kata kunci: Kebijakan publik, Covid-19, Makassar recovery, Kota Makassar

ABSTRACT

Muh Dwin Putra Abadi Purnama Ismail, Student Number E041181320, Department of Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, with the thesis title "Implementation of the Makassar Recovery Program Policy in Handling Covid-19 in Makassar City". Sakinah Nadir As main advisor and Ummi Suci Fathia Bailusy As Assisting Advisor.

The Makassar City Government issued a Perwali policy Number 5 of 2021 concerning Makassar Recover in the context of tackling the Covid-19 pandemic in Makassar City. The purpose of this research is to find out how the Makassar Recovery program policy is implemented in handling Covid-19 in Makassar City.

The basis of research in this study uses qualitative research with descriptive analysis type, where this type of research is a way of solving a problem based on facts and existing data. The theoretical basis used in this study is the implementation theory of Merille's. grindle to see the role and implementation of the government regarding the Covid-19 Handling policy in Makassar City. This was done by seeing that the researcher had obtained information that was carried out directly by interviewing related parties.

Based on the results of this study, there are 3 factors that influence Policy Implementation, namely the strategy of the actors involved, the characteristics of the institution and the level of compliance. In implementing the Makassar recovery program policy, it was found that the success of the Makassar recovery program policy was inseparable from the Health Office and related agencies who took part in handling Covid-19 and all elements involved were able to carry out their duties properly so that 3 Makassar ecosystem recovery, namely Health Immunity social adaptation, and economic recovery can go well so that people affected by the spread of the Covid-19 Virus can adapt well and the effectiveness of the Makassar recovery program in tackling the Covid-19 disaster won an award at the Indonesia Awards 2021 event held by MNC Inews.

Keywords: Public policy, Covid-19, Makassar recovery, Makassar city

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Konsep Kebijakan publik.....	12
2.1.1 kebijakan publik	12
2.1.2 Implementasi Kebijakan publik	16
2.2 Program Makassar Recovery	20
2.3 Pandemi Covid-19.....	21
2.4 Penelitian Terdahulu	24
2.5 Kerangka Berpikir	28
2.6 Skema kerangka berpikir	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
3.1 Dasar dan tipe penelitian	30

3.2	Lokasi Penelitian.....	31
3.3	Sumber Data.....	32
	3.3.1 Data primer	32
3.4	Teknik Pengumpulan Data	32
	3.4.1 Studi pustaka (library research)	32
	3.4.2 Wawancara	33
	3.4.3 Narasumber/Informan penelitian.....	33
3.5	Teknik Analisis Data	35
	3.5.1 Reduksi data	36
	3.5.2 Penyajian data	36
	3.5.3 Penarikan Kesimpulan.....	36
BAB IV		38
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....		38
4.1	Gambaran Umum Kota Makassar.....	38
	4.1.1 Kondisi Sosial, Ekonomi dan budaya Kota Makassar	38
	4.1.2 Sejarah Kota Makassar	42
	4.1.3 Letak geografis Kota Makassar	44
4.2	Kota Makassar di era pandemi.....	47
BAB V		50
HASIL DAN PEMBAHASAN		50
5.1	Kebijakan Program Ecosystem Makassar <i>Recover</i>	50
5.2	Indikator keberhasilan Implementasi Kebijakan <i>Makassar Recover</i>	57
	5.2.1 Kekuasaan, Strategi dari Aktor yang terlibat	57
	5.2.2 Karakteristik Lembaga	66
	5.2.3 Tingkat Kepatuhan.....	70

BAB VI	78
PENUTUP.....	78
6.2 Kesimpulan	78
6.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Covid-19 Kota Makassar Per Tanggal 31 Oktober 2021.....	6
Tabel 2. Narasumber Penelitian	35
Tabel 3. Luas Wilayah Seluruh Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2019	46
Tabel 4. Penanggung jawab yang terlibat dalam penerapan Makassar <i>recover</i>	71
Tabel 5. Sebaran COVID -19 di Kota Makassar 18 Januari 2021.....	75
Tabel 6. Sebaran COVID – 19 di Kota Makassar 16 November 2022	76
Tabel 7. Penerima Bantuan Modal UMKM	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada bulan maret 2020 WHO menetapkan Indonesia sebagai salah satu Negara dengan status pandemi Covid-19 (*Coronavirus disease 19*) penetapan didasarkan jumlah penyebaran virus yang meningkat secara signifikan dan global. Untuk itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan dalam bentuk keputusan Presiden tentang penetapan status pandemi Covid-19 (*Coronavirus disease 19*) sebagai bencana nasional pada tanggal 13 Maret 2020 tindak lanjut Surat keputusan tersebut Pemerintah membentuk tim tugas percepatan penanganan Covid-19 (*Coronavirus disease 19*) guna menyelaraskan kapasitas Pemerintah pusat dan Provinsi ¹. Keputusan Presiden ini mengatur mengenai pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (*Coronavirus disease 19*) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tujuan utama di bentuk gugus tugas tersebut untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang Kesehatan. Kedua, mempercepat penanganan Covid-19 melalui sinergi antar Kementrian/Lembaga dan pemerintah daerah. Ketiga, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19.

¹ Juaningsih, I., & Consuello, Y. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, Hal: 518.

Keempat, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional. Kelima, meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespons terhadap Covid 19²

Syarat utama menghadapi pandemi Covid-19 saat ini adalah kebijakan pemerintah yang baik, Hal ini mengubah cara-cara baru dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara termasuk bagi Pemerintah Kota yang mengelola seluruh proses pengabdian kepada masyarakat agar semua kegiatan di berbagai bidang dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya didasarkan pada kebutuhan untuk menangani masalah yang muncul di masyarakat sesuai dengan pengungkapan kebijakan publik yang ditetapkan oleh para pihak (stakeholder) khususnya pemerintah yang diarahkan untuk memenuhi keinginan dan kepentingan masyarakat.

Di Sulawesi Selatan ada 24 kabupaten/kota, data yang ditampilkan perkembangan penularan Covid-19 sampai hari ini, 23 Data yang dirilis tim satuan tugas Covid-19 pada Februari 2021 menunjukkan bahwa pasien virus Covid-19 di Sulsel terkonfirmasi sebanyak 54.715, kasus baru 506, kematian 827, dan sembuh total dari 50.255 kasus, hanya 270 yang sembuh dan 3.633 kasus aktif. Diseluruh wilayah indonesia provinsi sulawesi selatan sangat mengkhawatirkan karena menempati peringkat

² Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) tanggal 13 maret 2020

lima besar Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur kasus Covid-19 terbanyak dan Jawa Tengah³

Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar adalah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Selatan dan Indonesia bagian timur tentunya memiliki magnet tersendiri yang menarik orang untuk mencari nafkah di Kota Makassar. Di Sulawesi Selatan sendiri khususnya di wilayah Kota Makassar di mana pihak Pemerintah Kota melalui Walikota Makassar dan Wakil Walikota Makassar mengeluarkan sebuah kebijakan Perwali no 5 tahun 2021 sebagai upaya dalam memberikan solusi terhadap kondisi tatanan sosial masyarakat Kota Makassar melalui program Makassar *Recover Ecosystem* yang merupakan sebuah program penanggulangan virus Covid-19 di sektor wilayah Kota Makassar yang didalamnya menerapkan 3 tahapan utama yakni Immunitas kesehatan, Adaptasi sosial, serta Pemulihan ekonomi. Ketiga tahapan ini diperuntukkan untuk seluruh masyarakat yang berada di seluruh wilayah Kota Makassar, tentunya program ini diharapkan dapat memberikan dampak bagi masyarakat guna meningkatkan imunitas diri agar kiranya tidak mudah merasakan sakit di masa pandemi virus Covid-19 ini.

Dasar utama lahirnya program Makassar *Recover Ecosystem* ini yakni ingin menjawab tentang permasalahan ekonomi yang sedang terjadi

³ Dikutip dari Kementerian Informasi dan Komunikasi, per 23 februari 2021

<https://www.kominfo.go.id/>

di wilayah Kota Makassar bahkan hampir diseluruh negara mengalami hal serupa, dimana proses Perekonomian yang tidak berjalan lancar baik pada bidang investasi, perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dilain sisi juga ingin menjawab tentang permasalahan krisis kesehatan yang dialami oleh warga Kota Makassar ⁴.

Program Makassar *Recover* adalah program pengendalian Covid-19 di Kota Makassar yang mana program ini dinilai menjadi sebuah program inovatif dan inspiratif sehingga memberikan sumbangsih pemulihan bagi warga Makassar. Dengan adanya Program Makassar *Recover* Sulawesi Selatan berhasil menekan angka penularan covid-19. Kini, Kota Makassar berada di zona kuning setelah sebelumnya berada di zona merah Covid-19. Seiring dengan keberhasilan pemerintah Kota Makassar tersebut maka isolasi terpusat apung di Kapal Motor (KM) Umsini di tutup karena kasus penularan menurun beberapa pekan terakhir. Kasus Covid-19 terus melandai maka jumlah pasien pun otomatis berkurang, baik di rumah sakit maupun di kapal⁵.

Kiranya dampak yang ditimbulkan dari program inovatif Makassar *Recover Ecosystem* yakni pada pemulihan bagi warga Makassar, yang dimana dengan hadirnya program tersebut telah berhasil menekan angka

⁴ Swar, Alwi. "*Implementasi kebijakan Makassar recover*", Universitas Muhammadiyah Makassar 2022

⁵ Latief, M. I., & Solli, A. (2020). Social challenges of teen in recovery from drugs addictions: A case study of Makassar, Indonesia. *Enfermeria Clinica*, 30, 390-393.

penularan virus Covid-19. Kini Kota Makassar berada di zona kuning setelah sebelumnya berada di zona merah, hal tersebut menjadi sebuah tanda keberhasilan pemerintah Kota Makassar yang kemudian dibuktikan dengan ditutupnya tempat isolasi terpusat apung di Kapal Motor (KM) Umsini karena kasus virus Covid-19 yang mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir.⁶

Dengan adanya Program Makassar Recovery, Kota Makassar mencatatkan nol kasus penularan virus Covid-19 selama sepekan di Makassar berdasarkan data dari Posko induk Covid-19 data nol kasus suspek Covid-19 terjadi pada 25 oktober 2021 hingga 31 oktober 2021 Hal ini pula di tegaskan oleh Pemerintah kota Makassar melalui Wali Kota Makassar mengatakan nol kasus Covid-19 itu menandakan jika semua pihak sudah paham dan taat protocol Kesehatan. Pemerintah Kota Makassar melalui Walikota Makassar juga mengatakan keberhasilan dalam menekan penularan kasus itu membuahkan hasil setelah program Makassar Recovery yang di canangkan dan di jalankan sesuai sasarannya. Berdasarkan data pada posko induk Covid-19 Makassar selama Pandemi total kasus yang terkonfirmasi sebanyak 48.750 dan yang suspek sebanyak 9.603. Adapun data ter-update per tanggal 31 oktober 2021, pukul 23.59⁷

Latief, M. I., & Solli, A. (2020). Social challenges of teen in recovery from drugs addictions: A case study of Makassar, Indonesia *Enfermeria Clinica*, 30, 390-393.

⁷ <https://www.antaraneews.com/berita/2497889/makassar-catat-nol-kasus-covid-19-selama-sepekan> diakses pada 6 juli 2022 pukul 20.00

Table 1. Data Covid-19 Kota Makassar Per Tanggal 31 Oktober 2021

SUSPEK				KONFIRMASI (Covid-19)			
Discarded	Meninggal	total	follow up	sembuh	meninggal	total	konfirmasi
9480 (0)	123 (0)	9603 (0)	0 (0)	47449 (13)	1008 (0)	48543 (4)	8
9480 (0)	123 (0)	9603 (0)	0 (0)	47455(6)	1009 (0)	48551 (8)	8
9480 (0)	123 (0)	9603 (0)	0 (0)	47466 (11)	1010 (0)	48556 (5)	8
9480 (0)	123 (0)	9603 (0)	0 (0)	47473 (7)	1011 (0)	48563 (7)	8
9480 (0)	123 (0)	9603 (0)	0 (0)	47483 (10)	1012 (0)	48566 (3)	7
9480 (0)	123 (0)	9603 (0)	0 (0)	47490 (7)	1013 (0)	48570 (4)	7
9480 (0)	123 (0)	9603 (0)	0 (0)	47498 (8)	1014 (0)	48570 (0)	6

Sumber: <https://www.antaraneews.com/berita/2497889/makassar-catat-nol-kasus-covid-19-selama-sepekan>

Dengan melihat data yang ada di atas bahwa penanganan Covid-19 di Kota Makassar cukup baik di bulan Oktober karena memberikan prestasi dalam hal ini Makassar sepekan mencatatkan nol kasus penularan Covid-19. Dapat dikatakan program Makassar *recovery* berjalan sesuai dengan sasaran nya hal inilah yang diharapkan oleh masyarakat karena selama ini virus Covid-19 terus meningkat dengan berdampaknya virus itu ke kehidupan masyarakat mulai dari kegiatan hingga keberlangsungan hidup masing-masing.

Pengukuran dampak pandemi Covid-19 pada aspek sosial di Kota Makassar sejak merebaknya Covid-19 telah memiliki beberapa konsekuensi sosial dengan tatanan sosial masyarakat serta budayanya

yang luar biasa di rasakan oleh virus ini. Berbagai hal yang telah dilakukan selama ini seperti penghentian sementara kegiatan sosial yang memicu aktivitas masyarakat, penghentian sementara kegiatan di tempat umum dan jumlah penonton lebih dari 5 orang semuanya telah dibatasi, Sekolah diliburkan dan siswa belajar dari rumah, Prosedur kerja dibatasi dan diganti dengan *Work From Home (WFH)*. Saat itu kondisi tersebut sangat terasa dalam kehidupan masyarakat atau paling tidak masyarakat telah melihat adanya pergeseran. Keluarga berpenghasilan rendah dengan tingkat pendidikan rendah relatif mengalami dampak yang lebih buruk dibandingkan keluarga berpenghasilan tinggi dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Selama masa pandemi layanan pendidikan bagi anak menjadi terbatas Bagi keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, hal tersebut menjadi suatu hambatan karena mereka tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menyediakan layanan pendidikan di rumah.⁸

Tatanan sosial dan budaya masyarakat kita dikenal dengan keramahannya untuk bertemu dan berjabat tangan bahkan untuk menikmati senyuman hangat dan sapaan yang tidak pernah gagal terpancar. Saat ini tampaknya berjabat tangan dan bersalam harus di batasi karena kita harus menjaga jarak aman karena wabah virus Covid-19. Kebiasaan masyarakat kita mengikuti kegiatan arisan, undangan hajatan, kegiatan kemasyarakatan, ibadah bersama, dan kegiatan lainnya sudah terbentuk

⁸ Aeni, N. (2021). Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, & Sosial. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 17(1), 17-34

dan menjadi kebiasaan tentang situasi ini karena kita dipaksa untuk lebih banyak tinggal di rumah dan hanya diizinkan keluar rumah jika ada keadaan darurat yang nyata.⁹

Selain itu dampak yang ditimbulkan selama pandemi Covid-19 dalam aspek politik yaitu salah Satu kebijakan yang sangat populer dilakukan oleh Pemerintah adalah Perbatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Ini merupakan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 dan menekan angka kematian berlanjut. Walaupun ada beberapa fasilitas yang bersifat umum ditutup akan tetapi ada beberapa fasilitas yang bersifat urgen yang tetap dibuka selama PSBB seperti rumah sakit dan minimarket. Pemerintah sangat mengharapkan agar masyarakat dapat ikut berkontribusi dan mendukung kebijakan ini Namun fakta yang terjadi di lapangan sangat berbeda dengan apa yang diharapkan Masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti anjuran dari pemerintah¹⁰.

Kebijakan adalah seperangkat rencana program, kegiatan, tindakan, hasil akhir dan perilaku yang digunakan untuk memecahkan masalah. Kebijakan adalah seperangkat tindakan atau kelambanan yang dilakukan oleh aktor (pihak). Kebijakan yang akan di teliti oleh penulis

⁹ Pokhrel, S., & Chhetri, R. (2021). A literature review on impact of COVID-19 pandemic on teaching and learning. *Higher Education for the Future*, 8(1):133-141.

¹⁰ Baharuddin, Z. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Komunikasi Publik dan Politik: Studi Deskriptif Pentingnya Syiar Dakwah dalam Keluarga. *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan*, 12(2), 114-128.

adalah kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar yaitu Makassar *Recover*, Makassar *Recover* adalah Smart Emergency Protocol Against Covid-19 and Service *Recover* yang dimana di dalam Program tersebut ada 3 Ecosystem Makassar *Recover* (imunitas kesehatan, adaptasi sosial dan pemulihan ekonomi) Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana **Implementasi Kebijakan Program Makassar Recovery Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Makassar**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi kebijakan Program Makassar *Recover* dalam penanganan Covid-19 di Kota Makassar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini Untuk mengetahui dan menggambarkan Implementasi kebijakan program Makassar recovery dengan menganalisa peran pemerintah kota Makassar dan dampak dari penerapan program Makassar recovery

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat akademis

Hasil Penelitian ini merangsang munculnya penelitian baru dalam bidang ini sehingga studi ilmu politik dapat selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kegunaan ilmu pengetahuan, serta pelaksanaan sebuah kebijakan dalam lingkup Pemerintah Kota.

1.4.2 Manfaat praktis

Hasil Penelitian ini secara praktis dapat menggambarkan implementasi kebijakan program Makassar Recovery dalam penanganan Covid-19 di Kota

Makassar dan Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya maupun sebagai informasi bagi pembaca yang sama serta dapat menambah wawasan terkait masalah dalam pengimplementasian sebuah kebijakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai teori dan aspek yang di gunakan oleh peneliti untuk dapat memperkuat analisis mengenai Implementasi kebijakan program Makassar recovery dalam penanggulangan Covid-19 di kota Makassar.

2.1 Konsep Kebijakan publik

2.1.1 kebijakan publik

Istilah "kebijakan" memiliki banyak definisi atau arti Menurut Anderson kebijakan adalah suatu Tindakan yang yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah¹¹. kebijakan sebagai “seperangkat kegiatan dengan tujuan tertentu yang diikuti dan dilakukan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu”. Konsep ini menunjukkan bahwa suatu kebijakan dapat berasal dari individu atau sekelompok individu dan terdiri dari sekumpulan tindakan dengan tujuan tertentu. Terdapat banyak definisi kebijakan publik¹². sedangkan menurut Woll, kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Menurut Woll, dalam pelaksanaan

¹¹ Buku budi winarmo,kebijakan publik: teori dan proses,21

¹² Kebijakan Publik Dan Partisipasi Masyarakat (Implementasi Perda No. 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bekasi Terhadap TPA Sumur Batu)

kebijakan publik terdapat tiga hal yang berpengaruh sebagai implikasi dari Tindakan pemerintah. Pertama, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat. Kedua, adanya output dalam bentuk program masyarakat. Ketiga, adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kebijakan masyarakat.

pemahaman ini berimplikasi, seperti fakta bahwa kebijakan selalu memiliki tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada tujuan, bahwa kebijakan mengandung tindakan atau pola tindakan oleh pejabat pemerintah, bahwa kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah bahwa kebijakan dapat menjadi positif dalam arti bahwa mereka adalah beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu atau negatif dalam arti bahwa mereka adalah keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu dan bahwa kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah (otoritatif).

Dengan cara ini kebijakan selalu dikaitkan dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Terlepas dari kenyataan bahwa itu adalah alat keberadaan Kebijakan Publik diperlukan dan sangat penting karena kehadirannya mempengaruhi tercapai atau tidaknya suatu tujuan meskipun masih banyak prasyarat atau langkah lain yang harus diselesaikan sebelum mencapai tujuan yang dimaksud¹³. Penting karena

¹³ Rohaeni, N., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Indonesia Journal Of Education Management & Administrasion Review*, Hal:194

meskipun kebijakan di atas kertas telah dibuat melalui proses yang baik dan berisi informasi berkualitas tinggi kebijakan tersebut tidak dapat secara otomatis diadopsi dan kemudian memberikan apa yang dimaksudkan oleh penulisnya. Ini juga penting karena suatu kebijakan dapat dan sering terjadi dipandang seolah-olah lebih penting atau sejajar dengan tujuan yang ingin dicapai meskipun faktanya itu hanyalah alat.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat harus mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap.

Adapun tahap-tahap kebijakan publik menurut Budi Winarmo yaitu:

a. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu di tunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors) namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksanaan

c. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.¹⁴

¹⁴ Budi winarmo, kebijakan publik, teori, proses dan studi kasus hlm.35-37

Kebijakan publik pada dasarnya kebijakan yang selalu di kaitkan dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Yang memuat program dan kegiatan yang dijalankan. Kebijakan publik mencakup hukum, peraturan perundang-undangan, keputusan dan pelaksanaan yang di buat oleh Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, birokrasi pemerintahan, aparat penegak hukum dan badan-badan pembuat keputusan publik. Kebijakan publik dalam penelitian ini adalah Kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar yang tertuang dalam Peraturan Walikota no 5 tahun 2021 tentang Makassar Recovery. Hal ini kebijakan yang di hadirkan oleh pemerintah Kota Makassar melalui Walikota Makassar bertujuan untuk Menyelamatkan Masyarakat Kota Makassar dari Covid-19 Menurutnya Program Makassar *Recover* adalah program pengendalian Covid-19 di Kota Makassar yang mana program ini dinilai menjadi sebuah program inovatif dan inspiratif sehingga memberikan sumbangsih pemulihan bagi warga Makassar.

2.1.2 Implementasi Kebijakan publik

implementasi adalah “suatu proses dari politik ke administrasi untuk mengubah kebijakan menjadi tindakan kebijakan”. Dalam rangka menyempurnakan suatu program, pengembangan kebijakan.” Sedangkan menurut ¹⁵Rohaeni & Saryono,(2018) mengemukakan gagasan yang sama, menyatakan bahwa istilah “implementasi” secara umum mengacu pada

¹⁵ Pangaribuan, M., & Munandar, A. (2021). Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Menangani Pandemi Covid-19. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(1):1-9.

“implementasi atau penerapan.” Istilah “implementasi” biasanya merujuk pada suatu proses. yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. ¹⁶

Menurut Aneta, (2018) ada tiga elemen penting dalam proses implementasi yaitu adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, kelompok sasaran, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan bertekad untuk memperoleh manfaat dari program, perubahan atau perbaikan dan unsur pelaksana. Pelaksanaan dan pengawasan proses pelaksanaan akan ditangani oleh suatu organisasi atau seseorang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan dalam melaksanakan program-program yang telah dirancang untuk memenuhi tujuan organisasi berdasarkan definisi-definisi di atas. ¹⁷

Keberhasilan implementasi yang dilakukan pemerintah ditentukan oleh beberapa faktor dan masing-masing faktor atau variabel saling berhubungan antara satu sama lain adapun teori implementasi kebijakan yang menjadi dasar bagi peneliti dalam menganalisis yaitu melalui teori implementasi kebijakan dari merilee S. grindle, Menurut merilee S. Grindle

¹⁶ Rohaeni, N., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Indonesia Journal Of Education Management & Administrasion Review*, 2(1):193-204.

¹⁷ Aneta, A. (2018). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1):54-65.

bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di tentukan dua faktor, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation)

Menurut Merilee s. Grindle (1980) prosesnya Kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Pencapaian tujuan kebijakan impact atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran adapun isi kebijakan meliputi

a. *Interest affected* yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan

b. *Type of benefits* yaitu jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan

c. *Extend of change envision* yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas

d. *Site of decission making* yaitu letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan

e. *Program implementer* yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten

f. *Resources commited* yaitu sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Adapun Isi dari implementasi adalah Menurut Merilee s. Grindle (1980) adalah sebagai berikut ini ¹⁸:

A. *Power, interest and strategy of actor involved* yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat

B. *Institution an regime characteristic* yaitu karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan

C. *Compliance and responsiveness* yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan.

Dari pandangan diatas dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan, serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan dari aktor politik dan aspek sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan. dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan

¹⁸ Merilee S. Grindle. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton University Press, New Jersey, p. 11

pencapaian tujuan dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

2.2 Program Makassar Recovery

Mengutip dari Website Pemerintah Kota Makassar, Makassar *Recover* adalah *Smart Emergency Protocol Against Covid-19 and Service Recover* yaitu upaya atau tindakan yang dilakukan melalui protokol penanganan secara cepat dan terukur berkenaan dengan penanganan dan pelayanan Covid-19. Makassar *Recover* adalah program Dari Walikota Makassar. Program ini diluncurkan karena adanya wabah pandemi Covid-19 yang menyebabkan dampak yang signifikan bagi seluruh aspek kehidupan, kebijakan program Makassar *Recover* dalam tujuannya untuk mencapai Imunitas kesehatan, adaptasi sosial dan juga pemulihan ekonomi

Kebijakan pemerintah yang baik menjadi syarat utama untuk menangani pandemi Covid-19 saat ini, hal ini merubah cara-cara baru dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara

termasuk bagi pemerintah daerah dalam mengelola seluruh proses pelayanan masyarakat untuk memastikan seluruh kegiatan di berbagai bidang¹⁹ berjalan secara normal dengan penyesuaian terhadap kondisi pandemi Covid-19. hingga Pemerintah kota Makassar membuat peraturan No 5 tahun 2021 yaitu Makassar Recovery(Smart Emergency protocol Against covid-19 & service) Pemerintah kota Makassar melalui Walikota Makassar mengatakan program Makassar Recovery merupakan cara baru untuk menyelamatkan warga Kota Makasssar dari pandemi Covid-19 yang memakai sistem digital, pengukuran ketaatan jelas dan kemudian reward and punishment yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kota Makasar dan menurut Walikota Makassar yang paling menarik adalah partisipasi seluruh masyarakat yang menentukan keberhasilan program ini, Program Makassar recovery ini terbagi 3 ecosystem yaitu imunitas kesehatan, adaptasi social dan pemulihan ekonomi.

2.3 Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 adalah wabah yang terjadi secara serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan penyakit menular (epidemi) yang menyebar hampir di seluruh negara atau benua dan biasanya mengenai banyak orang. Penyakit ini disebabkan

¹⁹ <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/download/2580/2068> diakses pada 13 juli 2022

oleh Covid-19 virus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 14 November 2020 lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh.²⁰

Menurut (Pangaribuan & Munandar, 2021) banyak negara di dunia kasus dan bahkan wabah Covid-19 telah terjadi²¹. WHO dan melalui Kementerian Kesehatan memberikan arahan untuk melakukan beberapa langkah pencegahan agar dapat mengurangi risiko terinfeksi atau menyebarkan Covid19:

- a. Seringlah mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol dapat membunuh virus di tangan.
- b. Jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang yang batuk-batuk atau bersin-bersin. Ketika batuk atau bersin, orang mengeluarkan percikan dari hidung atau mulutnya dan percikan ini dapat membawa virus. Jika terlalu

²⁰ Pandemi Covid-19 - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

²¹ Wuryandani, H. (2020). Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Publik*, Hal:110

dekat seseorang dapat menghirup percikan ini dan juga virus Covid-19 jika orang yang batuk itu terjangkit penyakit ini.

c. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh berbagai permukaan benda dan virus penyakit ini dapat tertempel di tangan. Tangan yang terkontaminasi dapat membawa virus ini ke mata, hidung atau mulut, yang dapat menjadi titik masuk virus ini ke tubuh sehingga seseorang menjadi sakit.

d. Tetaplah tinggal di rumah jika merasa kurang sehat. Jika demam, batuk dan kesulitan bernapas, segeralah cari pertolongan medis.

e. Selalu memakai masker ketika terpaksa keluar rumah agar penularan virus Covid-19 bisa dicegah saat berpergian diluar rumah.

Tak dapat dipungkiri, kabar virus Covid-19 masuk ke Indonesia rupanya telah menciptakan kepanikan di tengah masyarakat. Akibat hal ini banyak masyarakat yang mulai mencari perlindungan guna mencegah penularan virus Corona. Adapun cara pencegahan Covid-19 yang dilakukan adalah²²

a. Lebih rajin mencuci tangan. World Health Organization (WHO) menyebutkan, cuci tangan adalah langkah awal yang efektif mencegah segala macam penyakit, seperti infeksi saluran pencernaan dan penyakit pernafasan.

²² Wuryandani, H. (2020). Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Publik*, Hal:110

b. Sadar akan kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih menjadi salah satu tolak ukur akan pengembangan suatu penyakit. Masyarakat Indonesia diminta agar tetap menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga dengan terus berperilaku hidup bersih dan sehat seiring dengan kasus virus Corona.

c. Mengubah pola makan sehat. Menurut WHO, ada beberapa cara pencegahan virus Covid-19 melalui makanan. Contohnya dengan menghindari konsumsi makanan cepat saji dan lebih sering memasak dirumah.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan bahan referensi. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan.

Pertama Penelitian yang dilakukan oleh asna aneta yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo”*. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai bentuk-bentuk implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo mengetahui dan menganalisis tingkat responsivitas pemerintah kota Gorontalo dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, mengetahui dan menganalisis tingkat keberterimaan masyarakat terhadap kebijakan program penanggulangan kemiskinan, dan mengetahui dan menganalisis faktor-